



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Utamakan Alternatif Pemerataan Pembangunan, Pemohon Uji UU IKN

Jakarta, 19 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang formil Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (19/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh SM Phiodias Marthias.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa pembentukan UU IKN tidak memperhatikan hal-hal penting seperti kondisi kekinian bangsa Indonesia yang sedang mengalami tantangan keuangan negara, ketersediaan analisis SWOT, relasi perjalanan bangsa dengan sejarah perkembangan peradaban, dan potensi alternatif pemerataan pembangunan bangsa dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam.

Dengan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon menilai bahwa sudah seharusnya UU *a quo* dibatalkan guna menghindari ketidakpastian masa depan bangsa, sambil mencari alternatif program pemerataan pembangunan dan melakukan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa. Dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta bertentangan dengan UUD 1945. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)